

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri Pedesaan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana

sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

Tabel 2.1 Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis PNPM Mandiri Pedesaan

No	Program	Sasaran
1	PNPM Mandiri Perdesaan	Kelompok Masyarakat Perdesaan
2	PNPM Mandiri Perkotaan	Kelompok Masyarakat Perkotaan
3	PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus 2012	Kelompok Masyarakat Pedalaman, Tertinggal dan Khusus Bencana
4	Rural Infrastructur Support(RIS PNPM)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
5	PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah	Kelompok Masyarakat Perdesaan
6	PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP)	Kelompok Masyarakat Pertanian Perdesaan
7	PNPM Kelautan dan Perikanan (KP)	Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pelaut
8	PNPM Pariwisata	Kelompok Masyarakat Perdesaan Potensial
9	PNPM Generasi	Kelompok Masyarakat Perdesaan
10	PNPM Green <i>Kecamatan Development Program</i> (G-KDP)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
11	PNPM Neighbourhood Development (ND)	Kelompok Masyarakat Perkotaan
12	PNPM Perumahan dan Permukiman	Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan

Sumber : Profil PNPM MP

Berdasarkan tabel di atas kita dapat simpulkan bahwa PNPM Mandiri ini memiliki berbagai program serta sasarannya masing-masing. Pada tahun 2007 Pemerintah melaksanakan kebijakan terpadu sebagai upaya percepatan penanggulangan

kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat dalam “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri” yang terdiri dari program Preogram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.

Tujuan dari Program ini adalah meningkatkan pengembangan sosial ekonomi wilayah berbasis pada potensi sumberdaya lokal untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur, Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian dan pariwisata serta pembangunan pemukiman dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Pembangunan yang di selenggarakan berupa pembangunan jalan yang rusak, penyediaan MCK yang layak, saluran serta penyediaan air bersih yang cukup, penyediaan peralatan pertanian dan penataan pemukiman yang kumuh untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan lapangan kerja yang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Walaupun masih banyak pembangunan insfrastuktur lainnya, tetapi dalam pelaksanaan pembangunan penataan pemukiman sendiri tidak mencakup semua pembangunan insfrastruktur PNPM Mandiri Pedesaan saja. Melainkan pembangunan yang di sesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah tersebut.

2.1.1.1 Teori Terhadap PNPM Mandiri Pedesaan Secara Normatif

Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan adalah Undang-Undang Desa no.6/2014 yang disahkan DPR-RI pada tanggal 18 Desember 2013 yaitu pemberian alokasi dana yang besar untuk Desa, dengan indikasi rata-rata Rp 1,4 Miliar per desa per tahun. Penerapan UU tersebut tentunya memerlukan peraturan-peraturan dan pedoman untuk pelaksanaan tata kelola di tingkat desa yang mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM MP, yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Pedesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM MP. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM MP. Prinsip-prinsip itu meliputi:

a. Desentralisasi

Pemulihan otoritas masyarakat diwujudkan dengan mendesentralisasikan sumberdaya pembangunan untuk dikelola secara mandiri oleh rakyat desa sebagaimana terwujud dengan penyediaan dana BLM. Pendelegasian wewenang ini BLM merupakan langkah memulihkan “Yang Politis” (wewenang untuk memutuskan) di kalangan rakyat desa. Penegakan prinsip desentralisasi adalah kunci utama menghadirkan “kedaulatan rakyat” dalam pelaksanaan program. Adanya intervensi negatif dari komponen komponen diluar masyarakat yang seringkali merasa lebih memahami dan paling berhak mewakili masyarakat merupakan hambatan yang sangat berpotensi menggugurkan penegakan nilai nilai tersebut, sehingga dalam setiap tahapan implementasi kegiatan perlu selalu dikawal dan di internalisaikan kepada seluruh unsur masyarakat dan aparat, bahwa salah satu kunci keberhasilan upaya Pemberdayaan Masyarakat bertumpu pada penegakan azas Desentralisasi tersebut. Dimana hak hak otonom masyarakat tidak dibenturkan pada kepentingan kepentingan politis dan elitis.

b. Partisipasi

Peningkatan bobot wewenang untuk memutuskan pendayagunaan sumberdaya pembangunan ditunjukkan dengan keterlibatan secara aktif warga desa di dalam musyawarah di desa/antar desa.

Partisipasi dalam perspektif pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai kemampuan argumentatif secara rasional. Konsisten dengan visi kedaulatan rakyat Indonesia yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", maka aktualisasi partisipasi adalah pencapaian "hikmat kebijaksanaan melalui musyawarah mufakat". Partisipasi bukan tindakan subyek moral yang otonom sebagai individu-individu yang bersifat atomistik, tetapi keterlibatan aktif warga negara untuk merumuskan kesepakatan/kepentingan kolektif yang bermanfaat langsung dalam aktivitas hidupnya sehari-hari. Setiap warga negara tanpa diskriminasi berhak berpartisipasi dalam menghadirkan "kedaulatan rakyat". Partisipasi merupakan prosedur pragmatis perumusan kepentingan kolektif antar warga yang bersepakat agar terjadi penguatan daya tawar politis. Penegakan prinsip partisipasi tidak semata-mata diukur dari tingkat kehadiran warga desa dalam musyawarah program, tetapi diukur dari substansi yang diperbincangkan maupun kualitas musyawarah mufakat untuk mencapai "hikmat kebijaksanaan".

c. Demokratis

Demokrasi kerakyatan di Indonesia adalah tindakan-tindakan warga negara diikat dan dibimbing oleh aturan legal normatif (hikmat kebijaksanaan) yang ditetapkan melalui prosedur

musyawarah mufakat. Pengambilan keputusan antar pihak yang saling berbeda kepentingan bukan indentik kompetisi untuk saling berkuasa satu terhadap lainnya. Hikmat kebijaksanaan dihasilkan melalui musyawarah mufakat yang diadakan atas dasar nilai-nilai normatif. Konsepsi kedaulatan rakyat, dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, dipahami sebagai penyatuan kehendak rakyat (kepentingan kolektif) yang dibangun secara terbuka melalui musyawarah. Tanpa pendasaran normatif (hikmat kebijaksanaan) para pembincang mudah tergesa-gesa mencapai klimaks keputusan mayoritas melalui pungutan suara. Pemutlakan prosedur-prosedur teknis instrumental pengambilan keputusan sebagai media kompetisi antar kepentingan desa-desa yang saling bersaing untuk memperoleh dana BLM dapat dibaca sebagai watak ketergesaan ini. Pendidikan demokrasi melalui PNPM Mandiri Perdesaan hendaknya difokuskan pada dua aspek yaitu pertama: pembelajaran sosial yang melahirkan kepemimpinan politik yang demokratis, dan kedua: pembelajaran sosial yang memperkuat masyarakat untuk untuk bermusyawarah-mufakat secara demokratis. Kepemimpinan politik yang demokratis merupakan daya pengendali paling efektif dalam menjaga kerja birokrasi/teknokrasi tidak jatuh menjadi otoritarian. Watak demokratis dalam diri pemimpin lokal dipastikan secara otoritatif menguraikan tegangan dialektis antara kekuasaan administrasi

birokrat/teknokrat dan kedaulatan rakyat berubah menjadi relasi kerjasama (gotong royong). Sedangkan, kemampuan berwacana secara demokratis menjadi media/wahana antar pihak berselisih kepentingan untuk secara terbuka menyepakati keputusan kolektif yang disepakati secara damai. Prinsip demokratis menjaga tegangan dialektis antar kekuasaan.

d. Prioritas

Hasil musyawarah adalah konsensus antar pihak yang berkepentingan atas dana BLM. Mufakat ini bukanlah sekedar kemenangan pendapat mayoritas melainkan keunggulan prioritas hak rakyat miskin yang diperjuangkan secara kolektif. Terwujudnya prinsip prioritas terkait tegaknya prinsip desentralisasi, partisipasi maupun demokrasi. Selain itu, tumbuhnya solidaritas sosial yang dalam budaya bangsa Indonesia disebut gotong royong pun menjadi penopang adanya perspektif bela rasa sosial dari kelompok masyarakat yang kuat/kaya untuk melindungi kelompok masyarakat yang lemah / miskin, dengan demikian tegaknya prinsip Prioritas berarti dana PNPM Mandiri Perdesaan lebih banyak mendanai kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat miskin yang diputuskan berdasarkan kesadaran kolektif dari masyarakat antar desa (kecamatan) melalui musyawarah mufakat.

e. Keberlanjutan

PNPM Mandiri Perdesaan pada dasarnya bersifat sementara, suatu saat akan berakhir. Keberlanjutan program menjadi salah satu prinsip yang harus ditegakkan agar ada kepastian proses pemberdayaan masyarakat tetap dapat berlangsung walaupun proyek telah berakhir. Penerapan prinsip keberlanjutan program diupayakan melalui prosedur kerja teknis keproyekan yang secara terukur dan pasti akan menghadirkan kesinambungan berlakunya prinsip-prinsip program di beragam kegiatan proyek pembangunan desa. Berbagai pihak bersedia mengimplementasikan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan (sebagai sebuah pengalaman yang baik) ke dalam mekanisme kerja proyek pembangunan desa. Pengarusutamaan prinsip-prinsip program dapat diartikan sebagai pengikatan horisontal atas keberagaman pola pembangunan desa melalui aturan standar yang disepakati bersama, sekaligus pengikatan secara vertikal dalam arus waktu pemberdayaan masyarakat untuk menjamin kepastian pengarusutamaan program terjadi pada masa yang akan datang.

Prinsip keberlanjutan akan terus-menerus digugat dalam perspektif pelebagaan sistem sosial sebagai dialektika intervensi kekuasaan administrasi negara dengan pemeliharaan tatanan sosial rakyat desa yang dikonstruksikan melalui prosedur demokrasi kerakyatan. Terlaksannya prinsip Keberlanjutan

menjamin tegaknya nilai-nilai program PNPM Mandiri Perdesaan dalam setiap aktivitas pembangunan di desa baik yang didanai melalui program PNPM Mandiri Perdesaan maupun dari sumber-sumber pendanaan lainnya. Selain itu, peran pemerintah lokal lebih nyata dalam menjamin terpeliharanya nilai-nilai program melalui penerbitan perangkat hukum dan aturan legal formal yang menjamin keberlanjutan.

2.1.1.2 Teori Terhadap PNPM Mandiri Perdesaan Secara Empirik

Dalam hal ini adalah guna dari pelaksana PNPM Mandiri bagi masyarakat. Program PNPM Mandiri sangat berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan produksi masyarakat, sesuai dengan tujuan program tersebut, adapun kegiatan yang telah terealisasi di lapangan yaitu :

1. pembangunan sarana prasarana pendukung bagi desa.
2. Terciptanya kepedulian, perhatian/dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, serta meningkatkan kualitas kegiatan dengan penggunaan teknologi sederhana, dan meningkatkan ketrampilan masyarakat desa dalam perencanaan, pengendalian, monitoring dan pemeliharaan prasarana, dalam teknis pelaksanaan.
3. Dalam bidang pendidikan PNPM Mandiri perdesaan juga ikut memperbaiki, karena bidang pendidikan merupakan salah satu jenis kegiatan yang dapat dipilih masyarakat secara demokratis

pada Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa. Sejalan dengan prinsip Open Menu, semua jenis kegiatan formal maupun nonformal (termasuk pelatihan ketrampilan masyarakat). Hal itu bertujuan untuk mempercepat upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan menitikberatkan pada pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan kapasitas rumah tangga miskin pedesaan melalui pelatihan bagi pemuda putus sekolah, ibu-ibu rumah tangga untuk menciptakan daya saing dan lapangan pekerjaan.

4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
5. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
6. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
8. Pengembangan jaringan kemitraan dalam masyarakat.

Cukup banyak guna yang bisa didapatkan dari PNPM Mandiri dengan program pemberdayaan masyarakat yang memberikan manfaat dengan mengusahakan semua warganya bisa berpartisipasi langsung untuk membangun daerahnya, sehingga setiap warga bisa merasakan proses dalam pencapaian kesejahteraan yang telah direncanakan.

Seperti Halnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Desa Pasir Mulya Kecamatan

Banjaran. Yang telah berhasil membangun Kampung Wangun Pasir Mulya, yang tadinya kampung yang terisolir, dengan memberdayakan masyarakat Desa pasir Mulya Menjadikan Kampung Wangun menjadi kampung wisata dan sebagai percontohan untuk daerah-daerah lain yang ingin mengembangkan wilayahnya. Pembangunan tersebut berupa pembangunan unit rumah, jalan, jembatan mck, serta bantuan alat pembuat kopi dan bibit kopi.

2.1.2 Teori Pendapatan

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang masih bingung dalam penggunaan istilah pendapatan, hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai income. Menurut standar akuntansi keuangan (2004 : 23.1), kata “income” diartikan sebagai penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan, penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain”). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti dan sewa.”

Definisi tersebut memberikan pengertian yang berbeda dimana income memberikan pengertian pendapatan yang lebih

luas, income meliputi pendapatan yang berasal dari kegiatan operasi normal perusahaan maupun yang berasal dari luar operasi normalnya. Sedangkan revenue merupakan penghasil dari penjualan produk, barang dagangan, jasa dan perolehan dari setiap transaksi yang terjadi. Pengertian pendapatan dikemukakan oleh Dyckman (2002 : 234) bahwa pendapatan adalah “arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung”.

Pengertian pendapatan didefinisikan oleh Sofyan Syafri (2002 : 58) sebagai “kenaikan gross didalam asset dan penurunan gross dalam kewajiban yang dinilai berdasarkan prinsip akuntansi yang berasal dari kegiatan mencari laba”. Definisi pendapatan menurut Niswonger (1999 : 45), memberikan penekanan pada konsep pengaruh terhadap ekuitas pemilik, yaitu “pendapatan (revenue) adalah peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang dan jasa kepada pembeli. Adanya penafsiran yang berlainan terhadap pengertian pendapatan bagi pihak yang berkompeten disebabkan karena latar belakang disiplin yang berbeda dengan penyusunan konsep pendapatan bagi pihak tertentu.

Konsep pendapatan belum dapat dijelaskan secara universal oleh pemakai akuntansi, karena pemakai informasi laporan keuangan khususnya laporan laba rugi yang memuat tentang pendapatan berguna untuk masing – masing pemakai laporan yang berbeda – beda tergantung dari sudut mana ia memandang. Secara garis besar konsep pendapatan dapat ditinjau dari dua sisi yaitu :

- a. Konsep pendapatan menurut ilmu ekonomi.
- b. Konsep pendapatan menurut ilmu akuntansi.

2.1.2.2 Konsep Pendapatan Menurut Ilmu Ekonomi

Menurut ilmu ekonomi, pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode dan menenkankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah kenaikan harta kekayaan karena perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang. Harga ini ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan pasar produksi. Konsep penghasilan antara jumlah

output yang dijual. Dengan tingkat harga tertentu secara sistematis dirumuskan sebagai berikut (Rosyidi, 1998 : 23)

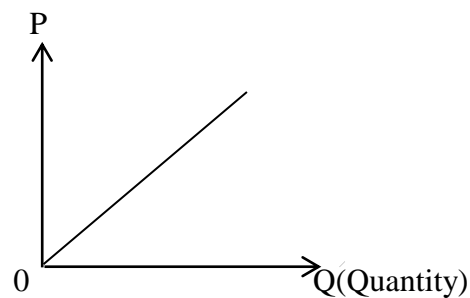
Keterangan :
$$\boxed{TR = P \times Q}$$

TR = total pendapatan dari hasil pendapatan pada tingkat harga tertentu (total revenue)

P = harga barang yang dihasilkan

Q = jumlah barang yang mampu dihasilkan

Dan dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kurva Total Revenue

Apabila dikaitkan dalam konteks pendaptan masyarakat kampung wangun. Berdasarkan teori di atas, pendapatan petani sangat dipengaruhi oleh seberapa besar biaya jual hasil produksi barang petani yang dihasilkan oleh setiap petani dan seberapa banyak jumlah barang produksi yang terjual tersebut setiap harinya. Sehingga dengan demikian dapat dirumuskan sebagai berikut: $TR = P \times Q$, dimana P = besar biaya jual hasil produksi

barang petani dan Q = banyaknya jumlah barang produksi yang terjual.

2.1.3 Teori Produksi

2.1.3.1 Pengertian Produksi

Secara umum, produksi dapat diartikan sebagai kegiatan optimalisasi dari faktor – faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan lain – lainnya oleh perusahaan untuk menghasilkan produk berupa barang – barang dan jasa – jasa. Secara teknis, kegiatan produksi dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa input untuk menghasilkan sejumlah output.

Dalam pengertian ekonomi, produksi didefinisikan sebagai usaha manusia untuk menciptakan atau menambah daya atau nilai guna dari suatu barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan pada kepentingan produsen, tujuan produksi adalah untuk menghasilkan barang yang dapat memberikan laba. Tujuan tersebut dapat tercapai, jika barang atau jasa yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sasaran kegiatan produksi adalah melayani kebutuhan masyarakat atau untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat umum. Dengan demikian produksi itu tidak terbatas pada pembuatannya saja tetapi juga penyimpanannya, distribusi, pengangkutan,

pengeceran, pemasaran kembali, upaya – upaya mensiasati lembaga regulator atau mencari celah hukum demi memperoleh keringanan pajak atau lainnya.

Produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai suatu objek atau membuat objek baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah kegunaan suatu objek tanpa mengubah bentuknya disebut produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah kegunaan suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuk yang disebut produksi barang.

Menurut Sugiarto (2007) produksi adalah kegiatan yang mengubah input menjadi output. Dalam kegiatan ekonomi biasanya dinyatakan dalam produksi. Sadono Sukirno (2010) menjelaskan bahwa fungsi produksi merupakan sifat hubungan diantara faktor – faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor produksi dikenal pula dengan istilah input dan jumlah produksi selalu juga disebut sebagai output.

Faktor – faktor produksi yang digunakan bersamaan dengan cara tertentu sehingga membuat produktivitas masing – masing faktor bergantung pada jumlah faktor produksi lainnya yang tersedia untuk digunakan dalam proses produksi lainnya (Mankiw, 2009 : 504). Faktor – faktor produksi selain tenaga

kerja yaitu tanah, modal dan mesin/telnologi dan keahlian, pengertian istilah tenaga kerja dan tanah telah jelas, namun definisi modal merupakan sesuatu yang rumit.

Para ekonom menggunakan istilah modal (capital) untuk mengacu pada stok berbagai peralatan dan struktur yang digunakan dalam produk. Artinya modal ekonomi mencerminkan akumulasi barang yang dihasilkan dimasa lalu yang sedang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang baru (Mankiw, 2009:501).

Kegiatan operasi merupakan bagian dari kegiatan organisasi yang melakukan transformasi dari masukan (input) menjadi keluaran (output). Masukan berupa sumber daya yang diperlukan seperti: modal, bahan baku dan tenaga kerja, sedangkan keluaran dapat berupa barang setengah jadi maupun barang jadi dan jasa.

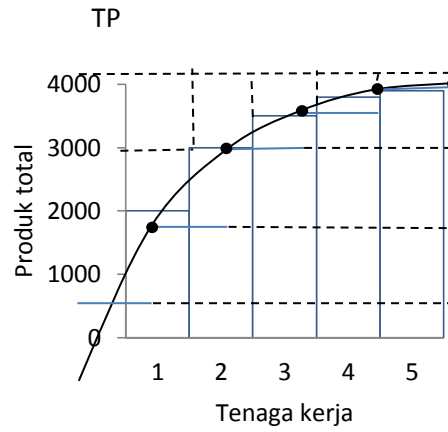
Dalam teori ekonomi, terdapat salah satu asumsi dasar mengenai sifat dari fungsi produksi yaitu “The Law of Deminishing Return”. Teori ini mengatakan bila satu-satuan input ditambah penggunaannya sedangkan input lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari tambahan satu unit input yang semula meningkat kemudian seterusnya menurun bila input terus ditambah (Dewi dkk, 2012).

Kurva yang menunjukkan hasil rata-rata per unit input variabel pada berbagai tingkat penggunaan input disebut Average Physical Product. Hubungan antara jumlah input yang diperlukan dan jumlah output yang dapat dihasilkan disebut “fungsi produksi”.

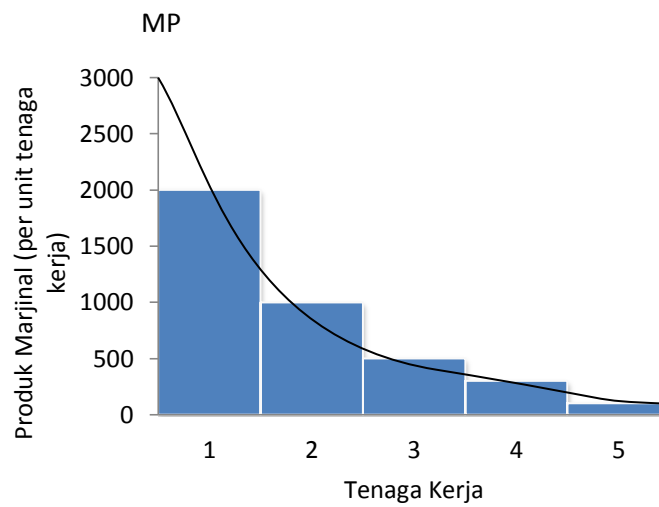
Fungsi produksi merupakan hubungan antara jumlah output maksimum yang bisa diproduksi dan input yang diperlukan guna menghasilkan output tersebut, dengan tingkat pengetahuan teknik tertentu. Bermula dari sebuah fungsi produksi perusahaan, kita dapat menghitung tiga konsep produksi yang penting, yaitu:

1. Produk total yang menunjukkan total output yang diproduksi dalam unit fisik.
2. Produk marjinal (marginal product) dari suatu input adalah tambahan produk atau output yang diakibatkan oleh tambahan satu unit input tersebut, dengan menganggap input lainnya konstan.
3. Produk rata-rata (average product) yaitu output total dibagi dengan unit total input.

(a) Produk Total



(b) Produk Marjinal



Gambar 2.2 Produk marjinal berasal dari produk total

Diagram (a) menunjukkan produk total meningkat dengan tambahan yang semakin kecil ketika semakin banyak unit input

yang ditambah. Diagram (b) menunjukkan produk marjinal yang makin berkurang.

Daerah (b) yang berada di bawah kurva produk marjinal (atau persegi berwarna biru) meningkat hingga produk total yang ditunjukkan pada (a).

Menurut “hukum hasil lebih yang makin berkurang” (law of diminishing returns), produk marjinal setiap unit input akan menurun sebanyak penambahan jumlah input yang bersangkutan, dengan asumsi semua input lainnya konstan.

Gambar 2.2 menggambarkan hukum hasil lebih yang makin berkurang untuk tenaga kerja, dengan asumsi bahwa tanah dan input lainnya konstan. Apa yang berlaku pada tenaga kerja juga berlaku pada tanah dan input lainnya.

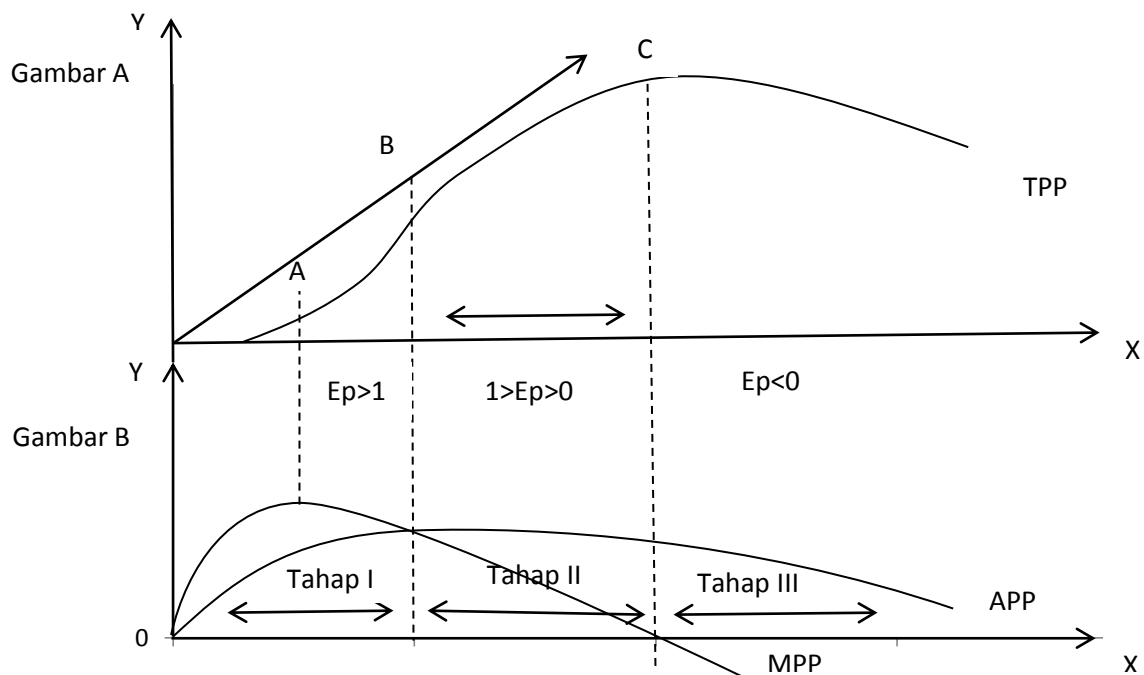
Hasil terhadap skala (Return to Scale), yaitu pengaruh peningkatan skala input terhadap kuantitas yang diproduksi. Ada tiga kasus penting yang harus dibedakan:

- Constant return to scale menunjukkan kasus bilamana perubahan semua input menyebabkan peningkatan output dengan jumlah yang sama.
- Decreasing return to scale timbul bilamana peningkatan semua input dengan jumlah yang sama menyebabkan peningkatan total output yang kurang proporsional.

- Increasing return to scale terjadi bilamana peningkatan semua input menyebabkan peningkatan output yang lebih besar.

Produksi yang efisien memerlukan waktu, sama seperti diperlukannya input konvensional tenaga kerja. Ada tiga jenis waktu yang berlainan di dalam produksi dan analisis biaya yaitu:

- Periode singkat (momentary run) yaitu periode waktu yang sangat pendek ketika tidak ada perubahan apapun dalam produksi.
- Periode jangka pendek (short run) adalah periode waktu ketika input variabel seperti bahan baku dan tenaga kerja dapat disesuaikan, tetapi kurang cukup lama untuk melakukan penyesuaian semua input. Dalam jangka pendek, faktor nonvariabel seperti mesin dan peralatan, tidak dapat sepenuhnya disesuaikan ataupun dimodifikasi.
- Periode jangka panjang (long run) adalah periode ketika semua faktor produksi, baik faktor variabel maupun nonvariabel yang digunakan oleh perusahaan bisa diubah, termasuk buruh, bahan baku, dan modal.



Gambar 2.3 Hubungan Antara Kurva TPP, MPP, APP dan Daerah-daerah Elastisitas Produksi

Keterangan :

1. Kurva TPP (Total Physical Product) adalah kurva yang menunjukkan tingkat produksi total pada berbagai tingkat penggunaan input variabel (input-input lain yang dianggap tetap).
2. Kurva MPP (Marginal Physical Product) adalah kurva yang menunjukkan tambahan (kenaikan) dari TPP, yaitu ΔTPP atau ΔY yang disebabkan oleh penggunaan tambahan satu unit input variabel.
3. Kurva APP (Average Physical Product) adalah kurva yang menunjukkan hasil rata-rata per

unit variabel pada berbagai tingkat penggunaan input.

2.1.3.2 Produksi Dengan satu Input Variabel

Produksi dengan satu input variabel mengasumsikan suatu kegiatan produksi yang dilakukan dengan menggunakan satu input tetap (misalnya lahan) L dan satu input variabel (misalnya tenaga kerja) L .

Dalam produksi dengan satu input variabel diberlakukan hukum produksi yang dikenal dengan *The Law Of Diminishing Returns* yang menyatakan bahwa : bila input variabel secara terus menerus ditambah maka produksi total (TP) akan cenderung naik tetapi produksi marginalnya (MP) akan semakin menurun. Hukum *The Law of Diminishing returns* menyatakan bahwa tenaga kerja yang digunakan dapat dibedakan dalam 3 tahap :

- Tahap pertama : produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat
- Tahap kedua : produksi total pertambahannya.
- Tahap ketiga : produksi total semakin lama berkurang.

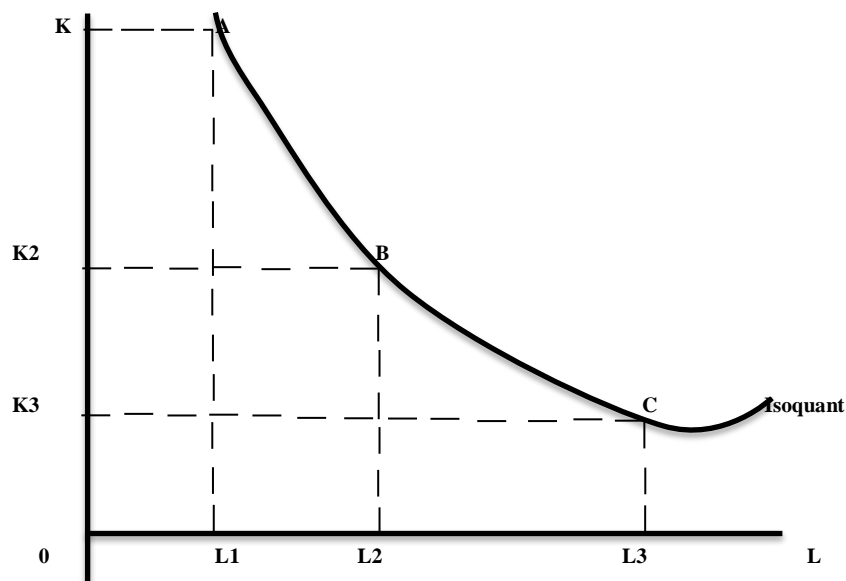
2.1.3.3 Faktor Produksi Dengan Dua Input Variabel

Jika faktor produksi yang dapat berubah adalah jumlah tenaga kerja dan jumlah modal atau sarana yang digunakan, maka fungsi produksi dapat dinyatakan $Q = f (K,L)$. Pada fungsi

produksi ini diketahui, bahwa tingkat produksi dapat berubah dengan merubah faktor tenaga kerja (L) dan atau jumlah modal (K). Perusahaan mempunyai dua alternatif jika berkeinginan untuk menambah tingkat produksinya. Perusahaan dapat meningkatkan produksi dengan menambah tenaga kerja, atau menambah modal atau menambah tenaga kerja dan modal.

a. Isoquant

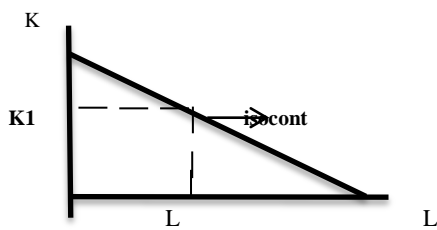
Isoquant menunjukkan kombinasi dua macam input yang berbeda yang menghasilkan output yang sama. Isoquant adalah sebuah kurva yang memperlihatkan semua kemungkinan kombinasi dari input yang menghasilkan output yang sama. Isoquant produksi menunjukkan berbagai kombinasi input yang diperlukan sebuah perusahaan untuk memproduksi suatu jumlah output tertentu.



Gambar 2.4 Kurva Produksi Sama (Isoquant)

b. Isocost

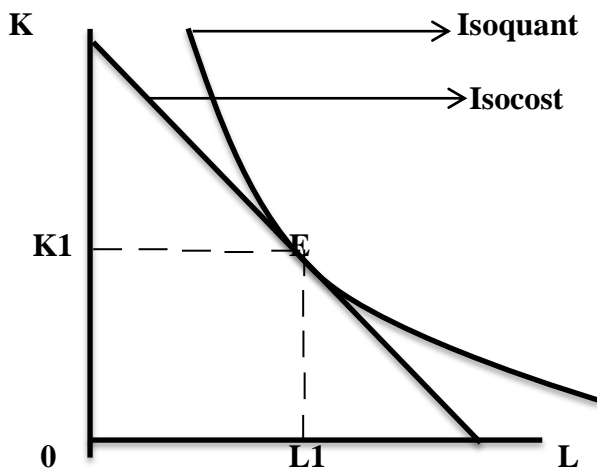
Isocost menggambarkan gabungan faktor – faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Untuk menghemat biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan biaya produksi. Untuk membuat analisis mengenai peminimuman biaya produksi perlulah dibuat garis biaya atau isocost.



Sumber: Teori Pengantar Ekonomi Mikro (Sadono Sukirno, 2013)

Gambar 2.5 Kurva Garis Biaya Sama (Isocost)

c. Kondisi Produksi Optimum



Gambar 2.6 Kurva Isocost dan Isoquant

Kondisi produksi optimum adalah kondisi seorang produsen dapat memilih kombinasi biaya input yang paling termurah untuk menghasilkan output. Untuk memproduksi sejumlah output tertentu, produsen bisa menggunakan berbagai kombinasi jumlah input dan dapat digambarkan dalam sebuah kurva isoquant. Berbagai kombinasi tenaga kerja dan kapital yang membebani perusahaan dengan biaya dalam jumlah yang sama dinamakan dengan isocost. Untuk meminimumkan biaya produksi sejumlah output tertentu, unit kegiatan ekonomi harus memilih kombinasi input dengan biaya minimum (least cost combination). Kombinasi ini terjadi pada saat garis isocost menyinggung kurva isoquant atau sama dengan kurva keseimbangan produsen (Pindyck, 2008).

2.1.3.4 Analisis Biaya Produksi

Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa.

Biaya eksplisit adalah biaya yang secara nyata dikeluarkan perusahaan, misalnya pengeluaran untuk membeli bahan baku untuk produksi, untuk membayar tenaga kerja langsung yang berkaitan dengan produksi dan sebagainya.

Biaya implisit adalah nilai dari input yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam proses produksi, tetapi tidak sebagai pengeluaran nyata yang dikeluarkan perusahaan.

Biaya kesempatan (opportunity cost) adalah nilai dari sumber-sumber ekonomi dalam penggunaan alternatif yang paling baik. Sumber-sumber ekonomi termasuk faktor produksi, misalnya bahan kayu, tenaga kerja, dapat digunakan secara alternatif. Apabila kayu tersebut telah digunakan untuk menghasilkan sesuatu barang maka ada kesempatan yang hilang untuk menghasilkan barang lain dengan kayu tersebut. Nilai kesempatan yang hilang ini merupakan biaya kesempatan. Biaya kesempatan tercermin dari harga faktor produksi tersebut di pasar.

Biaya total (total cost) merupakan total rupiah terendah yang diperlukan untuk memproduksi setiap tingkat output q . Biaya total (TC) naik sejalan dengan naiknya q .

Biaya tetap (fixed cost) merupakan total rupiah yang harus dikeluarkan perusahaan, walaupun tidak berproduksi; biaya tetap tidak dipengaruhi oleh setiap perubahan kuantitas output.

Biaya variabel (variable cost) merupakan biaya yang bervariasi sesuai dengan perubahan tingkat output termasuk biaya bahan baku, gaji, dan bahan bakar dan termasuk pula semua biaya yang tidak tetap.

$$TC = FC + VC$$

Biaya marjinal setiap tingkat output adalah tambahan biaya yang diperlukan untuk memproduksi 1 unit output tambahan.

Bagaimanakah bentuk kurva biaya marjinal (MC) sebenarnya? Studi empiris menemukan bahwa pada sebagian besar aktivitas produksi dalam jangka pendek (yaitu ketika stok modal tetap),

misalnya pada usaha pertanian dan usaha-usaha kecil lainnya, kurva biaya marjinalnya adalah berbentuk U seperti yang diperlihatkan dalam kurva berbentuk U mula-mula menurun sampai pada titik minimum, dan kemudian mulai meningkat lagi.

Sedangkan Biaya rata-rata adalah biaya total dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi, sebagaimana ditunjukkan dalam rumus yaitu,

$$AC = \frac{TC}{q}$$

Keterangan : AC = Biaya rata-rata

TC = Biaya Total

Q = Output

$$AFC = \frac{FC}{q}$$

Keterangan : AFC = Biaya tetap rata-rata

FC = Biaya tetap

Q = output

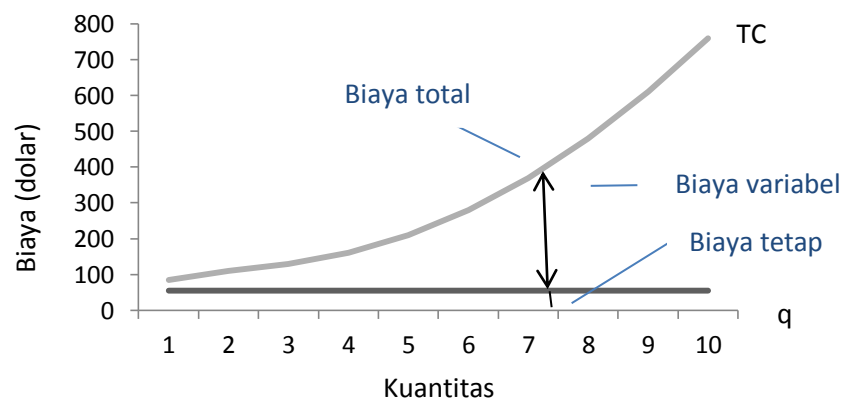
$$AVC = \frac{VC}{q}$$

Keterangan : AVC = Biaya variabel rata-rata

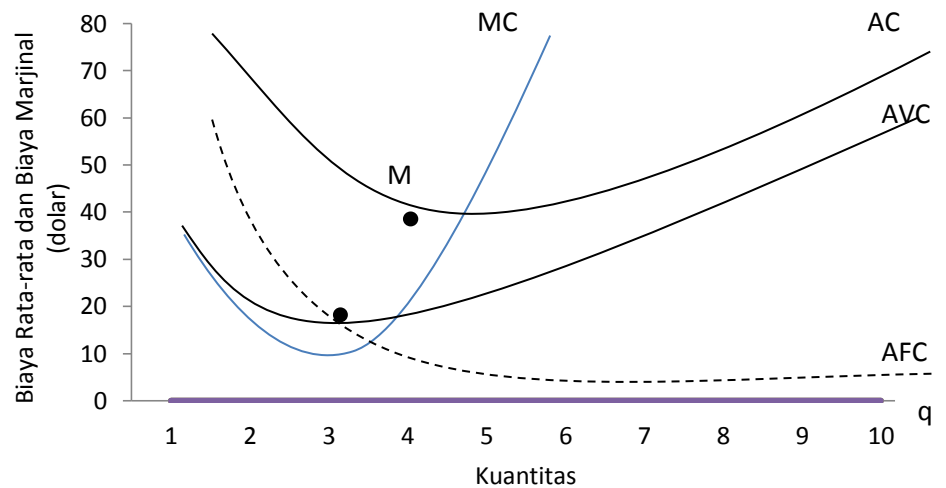
VC = Biaya variabel

Q = output

(a) Biaya Total, Biaya Tetap, dan Biaya Variabel



(b) Biaya Rata-rata, Biaya Marjinal



Gambar 2.7 Semua kurva biaya dapat diturunkan dari kurva biaya total

(a) Biaya total terdiri dari biaya tetap dan variabel.

(b) Kurva biaya marjinal berwarna biru turun kemudian naik, seperti ditunjukkan oleh angka-angka biaya marjinal (MC) berwarna biru terang. Tiga kurva biaya rata-rata dalam (b) dihitung dengan biaya total, tetap, dan variabel dengan output total. Bahwa MC memotong AC pada titik minimum.

Apabila biaya marjinal berada di bawah biaya rata-rata, maka biaya rata-rata akan tertarik ke bawah; apabila biaya marjinal (MC) sama dengan biaya rata-rata (AC), maka AC tidak naik dan tidak pula menurun, dan tetap berada pada titik

minimum; bilamana biaya marjinal (MC) berada diatas biaya rata-rata (AC), maka biaya rata-rata (AC) akan naik. Dengan demikian:

Pada bagian bawah kurva biaya rata-rata (AC) yang berbentuk U, $MC = AC = AC$ minimum.

Hubungan antara biaya dan produksi membantu kita menjelaskan mengapa kurva biaya bentuk U begitu umum dalam ilmu ekonomi berdasarkan “hukum hasil lebih yang makin berkurang” (law of diminishing return).

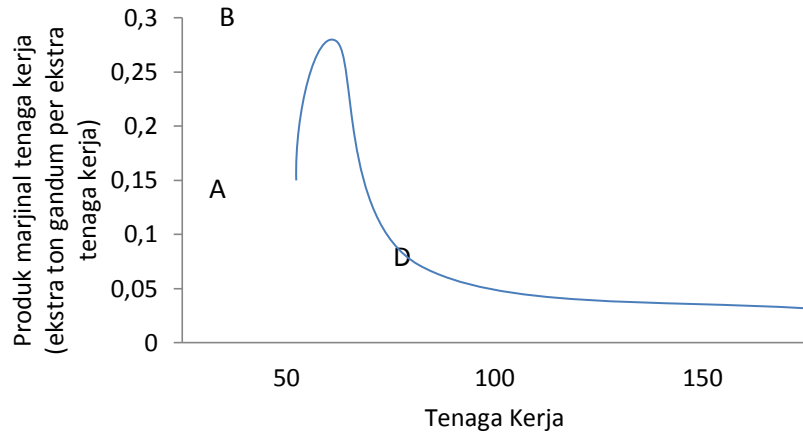
Untuk memahami dengan baik alasan mengapa kurva biaya berbentuk U, kita lakukan dengan meneliti faktor waktu yang terkait dalam proses produksi dan biaya. Kita ketahui bahwa perencanaan dan keputusan implementasi proses produksi dan biaya bisa memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kita membedakan tiga jenis waktu yang berbeda dalam analisis produksi dan biaya. Definisi mengenai periode sangat singkat (momentary run), jangka pendek (short run) dan jangka panjang (long run) dan diterapkan konsep-konsep tersebut terhadap biaya:

- Periode sangat singkat (momentary run) adalah periode waktu yang sangat pendek pada saat tidak ada satu

perubahan pun yang terjadi dalam produksi; dalam periode ini biaya bersifat tetap.

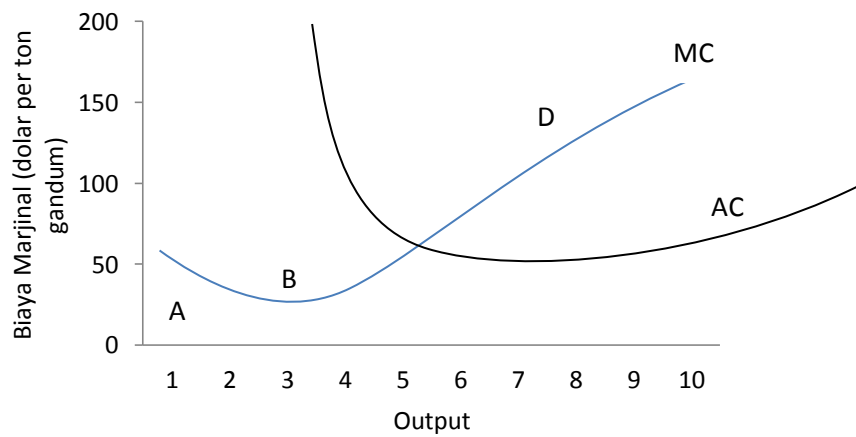
- Periode jangka pendek (short run) adalah periode waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan input variabel, seperti bahan baku dan tenaga kerja, tetapi terlalu pendek untuk menyesuaikan semua input. Dalam jangka pendek, faktor produksi yang bersifat overhead seperti pabrik dan peralatan, tidak dapat dimodifikasi atau disesuaikan sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, hanya biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku yang merupakan biaya variabel, sedangkan biaya modal merupakan biaya tetap.
- Dalam jangka panjang (long run), semua input dapat disesuaikan termasuk tenaga kerja, bahan baku, dan modal; oleh karena itu dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel dan tidak ada satu pun yang merupakan biaya tetap.

(a) Diminishing Returns



Gambar 2.8 Hasil yang makin berkurang (diminishing return) dan kurva biaya berbentuk-U

(b) Menghasilkan MC Bersudut ke Atas



Gambar 2.9 Hasil yang makin berkurang (diminishing return) dan kurva biaya berbentuk-U

Kurva biaya marjinal berbentuk-U dalam (b) berasal dari bentuk kurva produk marjinal dalam (a).

Dengan tanah tertentu dan tenaga kerja variabel, produk marjinal tenaga kerja dalam (a) pertama naik ke arah kiri, B, menanjak ke B, lalu turun ke D ketika terjadi diminishing return dari tenaga kerja.

Kurva biaya marjinal berasal dari data produksi. Di daerah sebelah kiri B dalam (b), misalnya pada titik A, produk marjinal yang menaik berarti bahwa biaya marjinal menurun; pada B.

Produk marjinal puncak terjadi pada biaya marjinal minimum; di daerah sebelah kanan B, katakanlah pada D, ketika produk marjinal tenaga kerja menurun, biaya produksi marjinal output meningkat.

Secara keseluruhan, naik dan menurunnya produk marjinal terhadap faktor variabel menghasilkan kurva biaya marjinal berbentuk-U.

Kita dapat menyimpulkan hubungan antara hukum produktivitas dan kurva biaya berbentuk U sebagai berikut:

Dalam jangka pendek, ketika faktor produksi seperti modal adalah tetap, faktor produksi variabel cenderung menunjukkan fase awal dari increasing return yang kemudian diikuti oleh diminishing return.

Kurva biaya mula-mula menunjukkan fase biaya marjinal yang menurun, diikuti oleh meningkatnya biaya marjinal (MC) setelah terjadi diminishing return.

Biaya oportunitas dari suatu keputusan terjadi karena melakukan pilihan terhadap barang langka dengan mengorbankan barang lain. Biaya oportunitasnya adalah nilai dari barang atau jasa yang dilepaskan.

Hukum hasil lebih yang makin berkurang (law of diminishing return) pada intinya menyatakan bahwa penambahan suatu input, sementara input-input lainnya tetap, akan meningkatkan total output.

Akan tetapi, penambahan output itu cenderung berkurang dari waktu ke waktu.

2.1.4 Teori Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah.

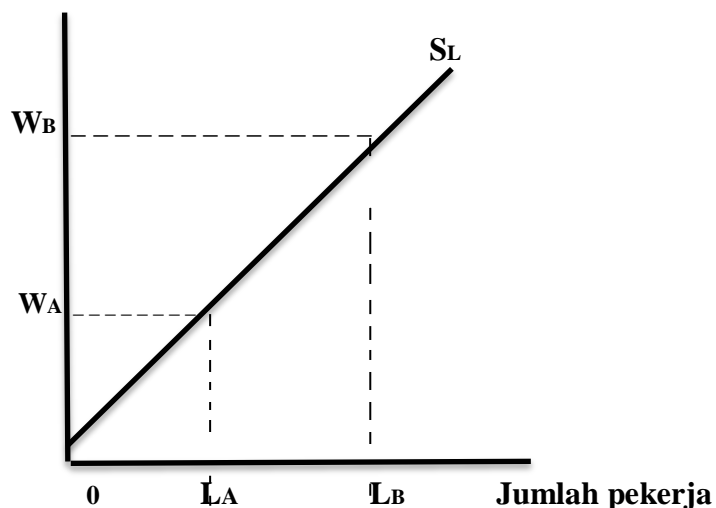
Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh keputusan seseorang apakah dia mau bekerja atau tidak. Keputusan ini tergantung pula pada tingkah laku seseorang untuk menggunakan waktunya, apakah digunakan untuk bekerja, atau digunakan untuk kegiatan lain yang sifatnya santai (tidak produktif tetapi

konsumtif), atau merupakan kombinasi keduanya.

Apabila dikaitkan dengan tingkat upah, maka keputusan untuk bekerja seseorang akan dipengaruhi pula dengan tinggi rendahnya penghasilan seseorang.

Maksudnya, apabila penghasilan tenaga kerja relatif sudah cukup tinggi, maka tenaga kerja tersebut cenderung untuk mengurangi waktu yang dialokasikan untuk bekerja. (Sonny Sumarsono, 2003).

Upah



Gambar 2.10 Kurva penawaran tenaga kerja

Berdasar hubungan antara tingkat upah dengan jam kerja, dapat diturunkan kurva penawaran tenaga kerja individual S_L yang menggambarkan kombinasi tingkat upah dengan jam kerja ditawarkan. Dalam suatu perusahaan terdapat lebih dari seorang tenaga kerja, sehingga sumbu mendatar yang

sebelumnya menunjukkan jumlah waktu kerja digantikan oleh jumlah tenaga kerja. Dengan demikian kurva penawaran tenaga kerja menunjukkan kombinasi antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang bersedia bekerja (Bosworth et al., 1996: 13). Kurva penawaran upah berlereng positif menunjukkan bahwa semakin tinggi upah nominal, semakin banyak tenaga kerja yang bersedia bekerja. Sebagaimana terlihat pada Gambar, maka pada upah nominal setinggi OW_A , terdapat sejumlah OL_A tenaga kerja yang bersedia bekerja. Kenaikan upah nominal menjadi OW_B mengakibatkan jumlah tenaga kerja yang bersedia bekerja naik menjadi OL_B .

2.1.5 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Chandra Indrawan (2011) yang berjudul: Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Pada Kampung Bumi Dana Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan).
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada

Program Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Masyarakat masuk dalam kategori peranan yang tinggi (berperan baik). Hal ini ditunjukkan oleh 35 orang (49,29%) yang menyatakan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung berperan sangat tinggi/sangat berperan dan tinggi/berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Program Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Masyarakat. (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Masyarakat di Kampung Bumi Dana Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan masuk dalam kategori partisipasi tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh 37 orang (52,11%) yang berpartisipasi sangat tinggi dan tinggi.

2. Penelitian Wahyuni (2011) yang berjudul: Evaluasi Partisipasi Masyarakat pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Di Pekon Kutodalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dan berperan dalam dalam pelaksanaan dan pencapaian hasil program pengembangan usaha agribisnis perdesaan di Pekon

Kutodalem Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, terdiri dari: (a) adanya ketepatan sasaran (target group) penerima dana PUAP yaitu rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil dan buruh tani serta pelaku usaha agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan maupun musiman. (b) Peningkatan akses pembiayaan kepada anggota Gapoktan Guyub Tani, yaitu adanya kemudahan bagi penerima BLM PUAP dalam mengakses bantuan yang disalurkan pada Gapoktan.

3. Penelitian Prihartini Budi Astuti (2012) yang berjudul: “Efektivitas dan Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011” merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dalam bentuk data panel dengan menggunakan alat analisis regresi linier data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh signifikan terhadap jumlah kepala keluarga miskin di Kabupaten Kebumen dengan pengaruh masing-masing variabel adalah variabel PNPM Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah 0,005459, PNPM Mandiri Perdesaan Non-

SPP sebesar -0,002676, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar -0,010433, Pendapatan Asli Desa (PADs) sebesar -0,022590, dan jumlah penduduk adalah sebesar -0,017860, dengan koefisien determinasi R² sebesar 99,87% pada tingkat kesalahan 5%. Berbeda dengan penelitian tentang “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Gubugkalah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)” diteliti oleh Justita Dura (Dura, 2016) merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.1.7 Kerangka Pemikiran

Dari beberapa referensi teori yang dijabarkan sebelumnya, maka penulis mencoba mengkaji bagaimana

keterkaitan beberapa pengaruh yang dapat mempengaruhi pendapatan dan produksi petani kopi kampung wisata wangun. Pendapatan dan produksi petani dapat ditentukan dari beberapa pengaruh yang mempengaruhinya.

Pendapatan dan produksi petani kopi pun erat hubungannya dengan program pemerintah penataan pemukiman dari PNPM Mandiri Pedesaan . Harga produksi pertanian, dan harga jual produk dan barang hasil pertanian yang terjual. Maka dengan adanya PNPM Mandiri Pedesaan berupa penataan pemukiman yaitu kesediaan infrastruktur yang menjadikan Kampung Wangun menjadi Kampung Wisata Wangun, yang menarik wisatawan dan berdampak pada usaha kopi di Kampung Wisata Wangun tersebut. Lalu PNPM Mandiri Pedesaan khususnya penataan pemukiman juga memberikan bantuan berupa bibit kopi , dan alat pembuatan kopi yang memiliki dampak sebagai berikut :

Kopi bagi petani di kampung wisata wangun merupakan sumber penghidupan utama sebagai tumpuan keberlangsungan hidup. Keunggulan dan kekhasan kopi wangun memberi kesan tersendiri bagi penikmat kopi dan menghantarkan kopi wangun ke kancah Internasional. Petani kopi di Kampung wisata Wangun Kec.Banjaran Kab.Bandung telah diakui sebagai penghasil kopi 10 di Amerika.

Sebelum adanya PNPM Mandiri Pedesaan biasanya hasil dari benih kopi tersebut selanjutnya akan dipasarkan oleh petani melalui beberapa saluran pemasaran, seperti penjualan kepada tengkulak dan menjual hasil pertanian langsung ke pelaku pemasaran yang ada di Kecamatan Banjaran, namun yang melakukan pembelian dalam skala besar terhadap petani adalah tengkulak dan eksportir.

Dalam hal ini perlu diketahui alasan petani atau faktor penyebab petani dalam menentukan arah penjualan, apakah menentukan keputusan menjual kepada tengkulak dan menjual hasil pertanian langsung ke pelaku pemasaran.

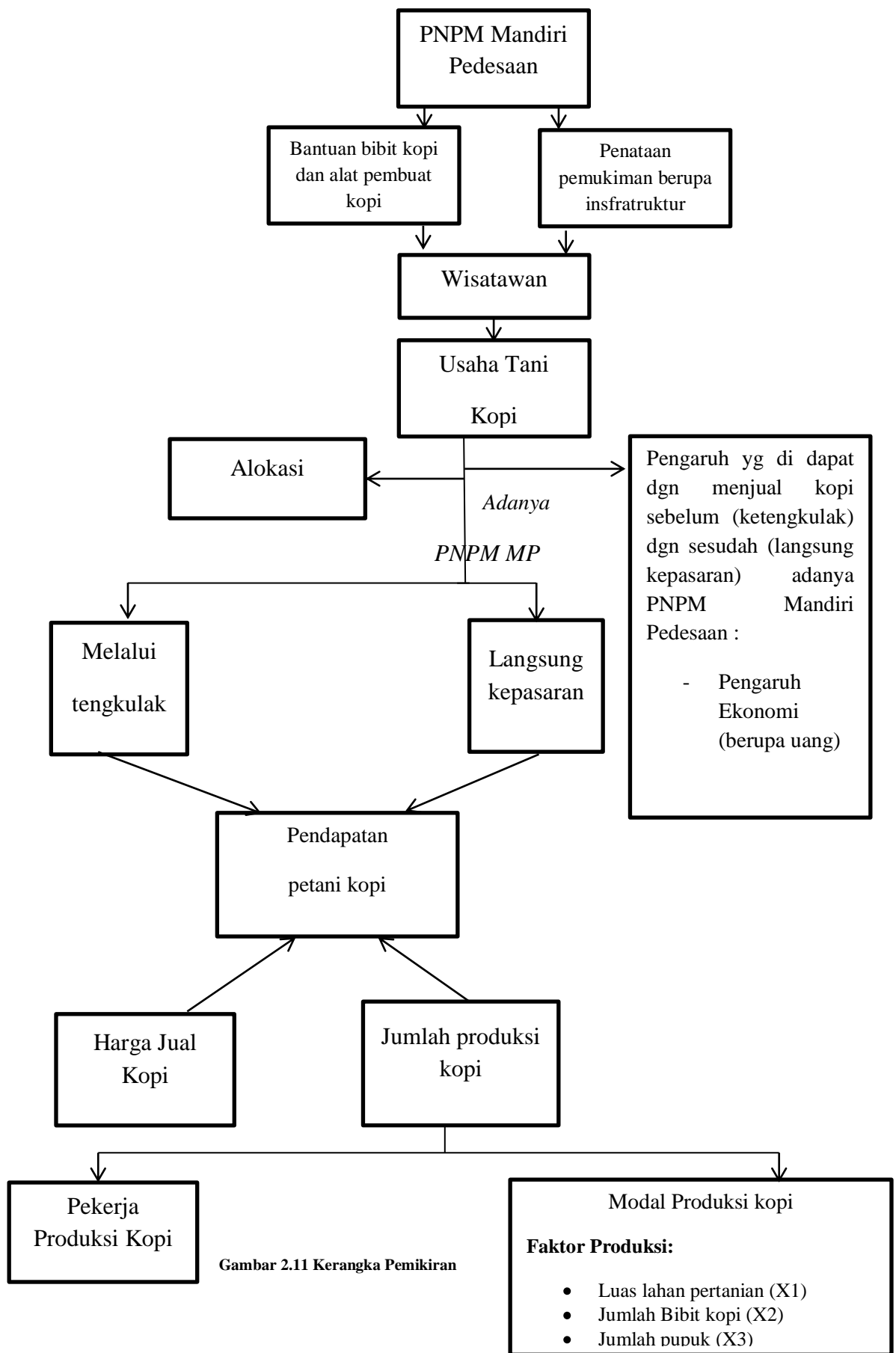
metode yang digunakan adalah analisis secara deskriptif yang mampu menguraikan faktor-faktor penyebab petani menjual kopi kepada tengkulak dan dan menjual hasil pertanian langsung ke pelaku pemasaran. selanjutnya untuk melihat pengaruh faktor penyebab tersebut menggunakan analisis regresi dengan variabel TR atau dependent bersifat kuantitatif.

Yaitu pendapatan penjualan melalui tengkulak dan langsung memasarkan kepada masyarakat, juga akan dikaji dalam bentuk uraian untuk menggambarkan keragaman usaha tani petani kopi hingga menuju kearah pendapatan dan produksi sebelum (penjualan melalui tengkulak) dengan sesudah (pemasaran langsung) adanya PNPM Mandiri Pedesaan. Dengan

keadaan tersebut menjelaskan skala usaha tengkulak dan menjual hasil pertanian langsung ke pelaku pemasaran mulai dari ketersediaan sarana prasarana, modal, sistim pembayaran yang terjadi, dan hal lainnya yang berkaitan dengan jalannya usaha yang dilakukan tengkulak dan eksportir.

Selanjutnya, manfaat ekonomis yang diperoleh petani dari pilihan menjual kopi kepada tengkulak maupun eksportir akan dianalisis melalui pandangan atau persepsi petani kopi sebelum dan sesudah adanya PNPM Mandiri Pedesaan. Hasil total pendapatan dari penjualan kopi yang petani kopi dapat, dapat dihitung melalui rumus *Total Revenue* (TR). Kegiatan petani menjual hasil kopinya tentu saja digunakan untuk mendapatkan penerimaan atau pendapatan yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh sebab itu, pola penggunaan hasil total penjualan kopi tersebut perlu diketahui. Untuk lebih jelas, kerangka pikir pola penggunaan hasil, manfaat dan faktor penyebab penjualan kopi petani kepada tengkulak dan eksportir (pemasaran) di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Gambar 2.11



Gambar 2.11 Kerangka Pemikiran

2.1.8 Hipotesis

Menurut Suharsimi (2010: 110) hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan suatu penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Apabila peneliti telah mendalami permasalahan penelitiannya dengan seksama serta menetapkan anggapan dasar, maka lalu membuat suatu teori sementara yang sebenarnya masih perlu diuji (di bawah kebenaran). Inilah hipotesis peneliti harus berfikir bahwa hipotesisnya itu dapat diuji.

Berdasarkan kajian teoritis diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah produksi dan harga kopi diduga mempunyai hubungan pengaruh yang positif terhadap pendapatan petani kopi kampung wisata wangun.
2. Harga jual kopi diduga mempunyai hubungan pengaruh yang positif terhadap produksi petani kampung wisata wangun.
3. Program Pemerintah penataan pemukiman diduga mempunyai hubungan pengaruh yang positif terhadap pendapatan petani kopi kampung wisata wangun.